Pemerintah
DKI Jakarta

# RENSTRA

Rencana Strategis

## Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2023 - 2026

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1421 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, perlu disusun Rencana Strategis sebagai satu kesatuan dalam sistem Rencana Pembangunan Daerah;
2. bahwa memperhatikan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, agar menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;

7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023-2026.

KESATU : Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menyusun Rancangan Kerja untuk tahun 2023-2026.

KETIGA : Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 10 Juni 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

ELISABETH RATU RANTE ALLO
NIP 197009241998032004

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
6. Para Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
11. Para Kepala UKPD di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

# Daftar Isi


**DAFTAR ISI** iv
**DAFTAR TABEL** vi
**DAFTAR GAMBAR** viii

**01 PENDAHULUAN** 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 9

**02 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH** 12
**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah** 12
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 16
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 18
2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang 19
2.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas 26
2.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional 30
**2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** 30
2.2.1. Kondisi Kepegawaian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 30
2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 32
**2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** 33
2.3.1. Capaian Indikator Kinerja 33
2.3.2. Realisasi Anggaran 37

# Daftar **Isi**


2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 41

**03 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 45**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 45

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 49

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga 52

3.3.1. Telaahan Renstra Kementrian Perindustrian 52

3.3.2. Telaahan Renstra Kementrian Perdagangan 57

3.3.3. Telaahan Renstra Kementrian Koperasi dan UKM 61

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 63

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 63

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 70

**04 TUJUAN DAN SASARAN 73**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 73

**05 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 79**

**06 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 86**

**07 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 185**

**08 PENUTUP 187**

# Daftar Tabel


2.1. Data Pegawai berdasarkan Rentang Usia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 30

2.2. Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Per Bidang 31

2.3. Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp) 32

2.4. Jumlah Asset Barang Tidak Bergerak yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp) 32

2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 34

2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 38

3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 47

3.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 52

3.3. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 53

3.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024 57

# Daftar Tabel


3.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020-2024 62

3.6. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditinjau dari implikasi RTRW 68

3.7. Skala Penilaian Metode Rating 71

3.8. Penentuan Prioritas Isu Strategis 71

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 74

5.1. Matriks Analisis SWOT 80

5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 82

6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 87

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 185

# Daftar Gambar


2.1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 15

4.1. Cascading Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta 76

4.2. Cascading Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Perindustrian Provinsi DKI Jakarta 76

4.3. Cascading Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 76

4.4. Logical Framework Pengembangan Perdagangan 77

4.5. Logical Framework Pemberdayaan Perindustrian 77

4.6. Logical Framework Pemberdayaan UMKM 78

4.7. Logical Framework Pengembangan Koperasi 78

Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

# Bab I
# Pendahuluan

Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta yang berlandaskan pada RPD Provinsi DKI Jakarta berfungsi untuk menjabarkan visi dan misi RPJPD, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan

pada lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam menyusun Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Provinsi dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Provinsi DKI Jakarta.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Freight dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan Term Of Delivery Cost, Insurance And Freight Untuk Pelaksanaan Ekspor;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024;
28. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
29. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;
31. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030;
36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030;
38. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perindustrian;
39. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
40. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Provinsi DKI Jakarta sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi;

2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJPD tahun 2005-2025 Provinsi DKI Jakarta dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 4 tahun ke

depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun empat tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu empat tahun.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta indikator kinerjanya.

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam empat tahun mendatang.

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

**BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

# Bab II

## Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Struktur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas Kepala Dinas dan dibantu oleh :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum;
    2. Subbagian Kepegawaian
    3. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
    4. Subbagian Keuangan
c. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
    1. Seksi Pengembangan Industri;
    2. Seksi Industri Kecil dan Menengah; dan
    3. Seksi Industri Kreatif dan Digital.
d. Bidang Perdagangan, terdiri atas:

1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
3. Seksi Pemasaran

e. Bidang Koperasi
1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
2. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
3. Seksi Pembiayaan Koperasi.

f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah
1. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah; dan
3. Seksi Usaha Informal.

g. Bidang Pengawasan
1. Seksi Pengawasan Perindustrian dan Kemetrologian;
2. Seksi Pengawasan Perdagangan; dan
3. Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

h. Suku Dinas, terdiri atas
1. Suku Dinas Kota terdiri atas:
   a. Subbagian Tata Usaha;
   b. Seksi Perindustrian;
   c. Seksi Perdagangan;
   d. Seksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
   e. Satuan Pelaksana Kecamatan.
2. Suku Dinas Kabupaten terdiri atas:
   a. Subbagian Tata Usaha;
   b. Seksi Perindustrian; dan
   c. Seksi Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

i. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, KUKM terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan; dan
c. Satuan Pelaksana Bimbingan Teknis.

2. Unit Pengelola Metrologi, terdiri atas:
   a. Subbagian Tata Usaha;
   b. Satuan Pelaksana Pengujian dan Peneraan; dan
   c. Satuan Pelaksana Kalibrasi dan Pengendalian Mutu.
3. Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik, terdiri atas:
   a. Subbagian Tata Usaha;
   b. Satuan Pelaksana Pengujian, Inspeksi dan Kalibrasi; dan
   c. Satuan Pelaksana Sertifikasi dan Pengendalian Mutu.
4. Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil, dan Menengah serta Permukiman Pulogadung, terdiri atas:
   a. Subbagian Tata Usaha;
   b. Subbagian Keuangan;
   c. Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha; dan
   d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.
5. Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, KUKM, terdiri atas:
   a. Subbagian Tata Usaha;
   b. Satuan Pelasana Pengujian dan Inspeksi; dan
   c. Satuan Pelaksana Sertifikasi dan Pengembangan Pelayanan.
6. Pusat Data Dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, KUKM, terdiri atas:
   a. Subbagian Tata Usaha;
   b. Satuan Pelaksana Pengolahan dan Analisis Data dan Informasi;
   c. Satuan Pelaksana Sistem Informasi;
   d. Satuan Pelaksana Infrastruktur Teknologi Informasi.

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Provinsi DKI Jakarta sebagimana Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dapat dilihat pada Gambar 2.1

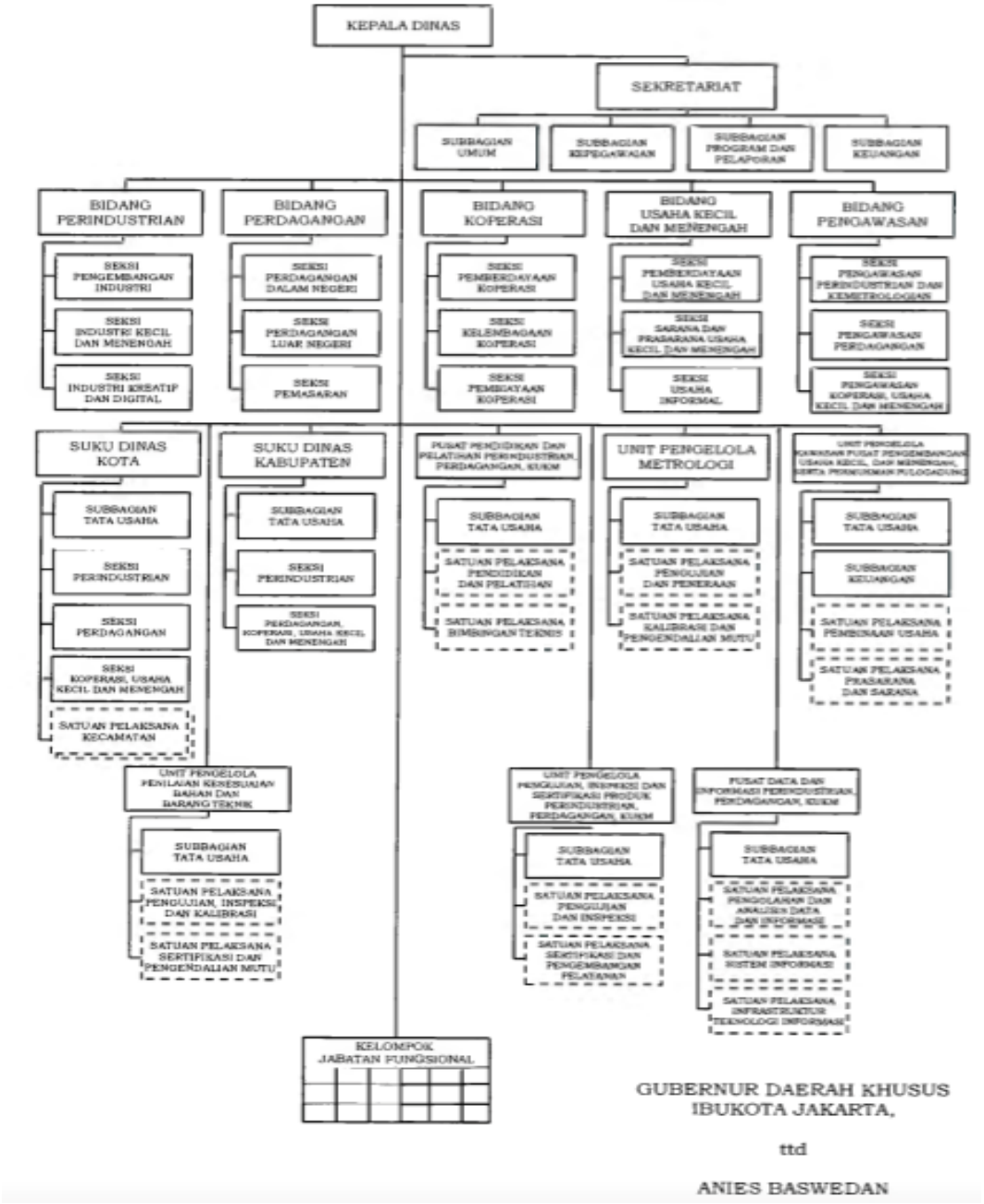


**Gambar 2.1**. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

### 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempuyai tugas pokok membantu bupati melaksananankan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Kepala Dinas juga mempunyai uraian fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
e. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan
f. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
g. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
h. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi dan sarana distribusi perdagangan;
i. pengoordinasian penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
j. pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
k. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;

l. pelaksanaan promosi perdagangan dan pencitraan produk ekspor;
m. pelaksanaan fasilitasi ekspor impor;
n. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal;
o. pelaksanaan perlindungan konsumen;
p. pelaksanaan pengujian, inspeksi dan sertifikasi mutu produk;
q. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
r. pelaksanaan kemetrologian berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
s. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi;
t. pengawasan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
u. pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
v. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah,
w. pelaksanaan pendampingan perlindungan hak kekayaan intelektual;
x. pelaksanaan pendampingan sertifikasi produk-produk industri;
y. pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
z. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
aa. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evauasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
bb. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang dberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

### 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
c. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
d. pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
e. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
f. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
g. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah Dinas;
h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Dinas;

i. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) pada Dinas;
j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki 5 Bidang dengan tugas dan fungsi seperti berikut ini:

1) Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. Bidang Perindustrian memiliki fungsi yakni sebagai berikut:

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

e. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan perindustrian;
f. pengoordinasian pendampingan perindustrian dalam rangka penumbuhan wirausaha industri;
g. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perindustrian;
h. pelaksanaan pendampingan perlindungan hak kekayaan intelektual produk industri;
i. pelaksanaan pendampingan sertifikasi produk industri;
j. pengoordinasian peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
k. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pendukung industri kreatif;
l. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan bidang perindustrian;
m. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
n. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perdagangan memiliki fungsi sebagai berikut ini:

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan;
f. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
g. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi dan sarana distribusi perdagangan;
h. pengoordinasian penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
i. pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
j. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
k. pelaksanaan promosi perdagangan dan pencitraan produk ekspor;
l. pelaksanaan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
m. pelaksanaan fasilitasi ekspor impor;
n. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal;
o. pengoordinasian pelatihan perdagangan;
p. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan bidang perdagangan;
q. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan

r. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3) Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Koperasi memiliki fungsi yakni sebagai berikut:

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
e. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan koperasi;
f. pengoordinasian pelatihan koperasi;
g. pelaksanaan akses pasar bagi produk koperasi;
h. pelaksanaan penilaian kesehatan dan perlindungan koperasi;
i. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan koperasi;
j. pelaksanaan pengelolaan dan perluasan akses pembiayaan koperasi;
k. pelaksanaan penyelesaian permasalahan dana bergulir koperasi;
l. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan/ non perizinan bidang koperasi;

m. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksananaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
n. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4) Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi yakni sebagai berikut:

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup Tugas dan fungsinya;
d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
e. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha informal;
f. pengoordinasian pelatihan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha informal dan kewirausahaan;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan;
h. pelaksanaan penyiapan akses pasar produk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha informal;

i. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha informal;
j. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan/ non perizinan bidang usaha kecil dan menengah;
k. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
l. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5) Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perlindungan konsumen. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengawasan memiliki fungsi yakni sebagai berikut ini:

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
e. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan kosumen;
f. pelaksanaan pengujian mutu produk dalam rangka pengawasan dan perlindungan konsumen;

g. pengoordinasian pelatihan, pengawasan, dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
h. pelaksanaan pengawasan kemetrologian;
i. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi;
j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
k. pelaksanaan pemberian sanksi untuk pelanggaran perizinan/ non perizinan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
l. pelaksanaan penegakan hukum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
m. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
n. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Suku Dinas

1) Suku Dinas Kota

Suku Dinas Kota mempunyai tugas membantu Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah pada wilayah kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Suku Dinas Kota memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Suku Dinas Kota;
d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Suku Dinas Kota;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan pada wilayah kota;
f. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah pada wilayah kota;
g. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat pada wilayah kota;
h. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi dan sarana distribusi perdagangan pada wilayah kota;
i. pengoordinasian penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting pada wilayah kota;
j. pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada wilayah kota;
k. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok pada wilayah kota;
l. pengoordinasian pengujian mutu produk pada wilayah kota;
m. pelaksanaan pemantauan dalam rangka pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi pada wilayah kota;
n. pengawasan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah pada wilayah kota;

o. pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah pada wilayah kota;
p. pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Kota;
q. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
r. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Suku Dinas Kabupaten

Suku Dinas Kabupaten mempunyai tugas membantu Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah pada wilayah kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, Suku Dinas Kabupaten memiliki fungsi:

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Suku Dinas Kabupaten;
d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Suku Dinas Kabupaten;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, dan kewirausahaan pada wilayah kabupaten;
f. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah pada wilayah kabupaten;

g. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat pada wilayah kabupaten;
h. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi dan sarana distribusi perdagangan pada wilayah kabupaten;
i. pengoordinasian penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting pada wilayah kabupaten;
j. pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada wilayah kabupaten;
k. pelaksanaan operasi pasar dalarn rangka stabilisasi harga pangan pokok pada wilayah kabupaten;
l. pengoordinasian pengujian mutu produk pada wilayah kabupaten;
m. pelaksanaan pemantauan dalam rangka pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi pada wilayah kabupaten;
n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah pada wilayah kabupaten;
o. pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah pada wilayah kabupaten;
p. pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Kabupaten;
q. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
r. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelaksanaan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sesuai struktur organisasi sebanyak 318 orang yang terdiri dari pegawai Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan, pegawai Suku Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan, serta pegawai UPT. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta jika dilihat dari rentang usia yakni sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Data Pegawai berdasarkan Rentang Usia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

| Umur | Jumlah |
|---|---|
| 21-30 | 66 |
| 31-40 | 87 |
| 41-50 | 63 |
| 51-60 | 102 |
| **Total** | 318 |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 2022*

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 318 orang. Berdasarkan data kualifikasi tingkat pendidikan Dinas Perindustrian, Perdaganagan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah per Februari tahun 2022 dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-3 : 1
2. Sarjana S-2 : 76
3. Sarjana S-1 : 162
4. Diploma -3 : 50
5. SMA : 26
6. SMP : 3

Selain itu, berikut ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tingkatan eselon pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 108 orang, yakni sebagai berikut:

(1) Eselon II : 1
(2) Eselon III : 14
(3) Eselon IV : 46
(4) Satuan Pelaksana : 4

**Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Per Bidang**

| Bidang/UKPD | Jumlah |
|---|---|
| Sekretariat | 30 |
| Bidang Perindustrian | 10 |
| Bidang Perdagangan | 11 |
| Bidang Koperasi | 12 |
| Bidang UKM | 15 |
| Bidang Pengawasan | 14 |
| Suku Dinas Jakarta Pusat PPKUKM | 23 |
| Suku Dinas Jakarta Utara PPKUKM | 20 |
| Suku Dinas Jakarta Barat PPKUKM | 21 |
| Suku Dinas Jakarta Selatan PPKUKM | 24 |
| Suku Dinas Jakarta Timur PPKUKM | 20 |
| Suku Dinas Kepulauan Seribu PPKUKM | 11 |
| UPK Pulogadung PPKUKM | 14 |
| UP Metrologi PPKUKM | 42 |
| UPPISP PPKUKM | 18 |
| UPPKB2T PPKUKM | 17 |
| Pusdatin PPKUKM | 4 |
| Pusdiklat PPKUKM | 12 |
| **Total** | 318 |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 2022*

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

| No | Jenis Barang Persediaan | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Alat Tulis Kantor (ATK) | 481.314.882 |
| 2 | Alat Listrik dan Elektronik | 29.105.076 |
| 3 | Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | 33.114.007 |
| 4 | Alat Rumah Tangga Kantor | 94.348.747 |
| 5 | Alat Rumah Tangga Kantor | 685.038 |
| 6 | Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi | 396.550 |
| 7 | Barang Pakai Habis Kebersihan | 3.076.588 |
| 8 | Barang Pakai Habis Teknologi Informasi komunikasi | 6.090.673 |
| 9 | Suku cadang kendaraan dinas operasional | 24.623.168 |
| 10 | Suku cadang alat – alat berat | 13.136.000 |
| 11 | Cetakan Umum | 15.475.951 |
| Total | | 701.366.680 |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 2022*

**Tabel 2.4. Jumlah Asset Barang Tidak Bergerak yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

| No | Jenis Barang Persediaan | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Tanah | 188.602.145.000 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 24.691.688.966 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 80.352.899.078 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.664.246.073 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 1.174.781.276 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0 |
| 7 | Aset Tidak Berwujud | 1.174.781.276 |
| 8 | Aset Rusak Berat (ARB) | 2.728.327.498 |
| 9 | Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 4.825.766.506 |
| 10 | Ekstrakomtabel | 154.890.700 |
| Total | | 306.536.495.797 |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 2022*

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PPKUKM, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-

bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan.

### 2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Volume Usaha Koperasi | | | | 4.986.712.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.825.107.746.377 | N/A | N/A | N/A | N/A | 297% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | jumlah ekspor DKI Jakarta | | | | 4.084.357.380 | 4.125.200.954 | 4.166.452.963 | 4.208.117.493 | 4.250.198.668 | 8.103.915.444,69 | 5.963.633.980,61 | 8.775.826.509,30 | 38.966.277.235,81 | N/A | 198% | 145% | 211% | 926% | N/A |
| 4 | Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi | | | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 123 | 128 | 125 | 126 | N/A | 103% | 107% | 104% | 105% | N/A |
| 5 | Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | | | | 10.000 | 27.799 | 27.799 | 27.799 | 27.797 | 17.534 | 29.717 | 59.449 | 46.903 | N/A | 175% | 107% | 214% | 169% | N/A |
| 6 | Jumlah wirausaha industri baru | | | | 2000 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 2.009 | 18.425 | 26.297 | 23.762 | N/A | 100% | 331% | 473% | 427% | N/A |
| 8 | Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrologian yang diawasi | | | | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 16 | 18 | 20 | 22 | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |
| 9 | persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |
| 10 | Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang | | | | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 314,56 | 190,19 | 82,15 | 78,38 | N/A | 328% | 196% | 84% | 79% | N/A |
| 11 | Persentase jumlah IKM yang berkualitas | | | | 7,04 | 9,85 | 12,66 | 15,47 | 18,28 | 7,04 | 9,85 | 18,39 | 22,58 | N/A | 100% | 100% | 145% | 146% | N/A |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 12 | Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif | | | | 14,6 | 29,1 | 43,7 | 58,3 | 72,8 | 14,6 | 54 | 48,5 | 175,97 | N/A | 100 % | 186 % | 111 % | 302% | N/A |
| 13 | Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya | | | | 15,03 | 28,77 | 42,52 | 56,26 | 70 | 15,11 | 28,77 | 28,91 | 33,85 | N/A | 101 % | 100 % | 68% | 60% | N/A |
| 14 | Persentase produk industri dengan standar SNI | | | | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 88,51 | 74 | 90,77 | 87,37 | N/A | 123 % | 100 % | 119 % | 112% | N/A |
| 15 | indeks kepuasan pelayanan kantor | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | N/A | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | N/A |
| 16 | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | N/A | 75% | 75% | 100 % | 100% | N/A |
| 17 | Jumlah pasar yang menggunakan alat kemtrologian yang diawasi | | | | N/A | 18 | 20 | 22 | 24 | N/A | 18 | 20 | 22 | N/A | N/A | 100 % | 100 % | 100% | N/A |
| 18 | Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terfasilitasi mengikuti promosi produk dalam negeri | | | | N/A | N/A | N/A | 75 | 75 | N/A | N/A | N/A | 626 | N/A | N/A | N/A | N/A | 835% | N/A |
| 19 | Jumlah pengurus koperasi yang keanggotaan di DKI Jakarta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian | | | | N/A | N/A | N/A | 70 | 70 | N/A | N/A | N/A | 502 | N/A | N/A | N/A | N/A | 717% | N/A |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 20 | Jumlah UMKM peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan teknis | | | | N/A | N/A | N/A | 70 | 70 | N/A | N/A | N/A | 4.800 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6857 % | N/A |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 2018-2022*

Berdasarkan tabel 2.5 dapat terlihat bahwa indikator kinerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Tahun 2018 – 2021 terdiri dari 20 indikator kinerja. Capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2021 dibandingkan dengan target yang terdapat di dalam Renstra adalah tercapai semua kecuali persentase produk IKM bebas bahan berbahaya. Capaian indikator kinerja persentase produk IKM bebas bahan berbahaya turun pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 68% dan 60%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan target yang cukup signifikan pada tahun tersebut, yaitu dari 28,77 pada tahun 2019 menjadi 42,52 dan 56,26 pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun capaian indikator kinerja tersebut turun, namun secara realisasi indikator kinerja tersebut tetap meningkat dari tahun ke tahun. Dalam mencapai Indikator Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM telah melakukan kegiatan baik yang dibiayai APBD maupun kegiatan yang berkolaborasi dengan stakeholder seperti, Perguruan Tinggi, Market online, Perusahaan Swasta maupun BUMN/BUMD ataupun Lembaga Negara lainnya. Beberapa kinerja yang telah dilakukan di tahun tersebut untuk mencapai Indikator Kinerja DPPKUKM yang juga merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional.

### 2.3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, selanjutnya perlu dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel berikut.

## Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi | 2.036.051.489 | 3.606.842.152 | 509.395.041 | - | - | 1.890.641.920 | 3.395.954.400 | 478.275.400 | - | - | 93% | 94% | 94% | - | - | -4% | -3% |
| Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM | 85.536.201.420 | 123.076.561.208 | 24.721.319.497 | - | - | 70.875.824.577 | 88.472.792.129 | 24.199.966.097 | - | - | 83% | 72% | 98% | - | - | -18% | -24% |
| Program pengawasan dan pelayanan perdagangan | 10.667.248.471 | 16.546.068.444 | 2.801.319.218 | - | - | 9.706.205.529 | 14.287.191.142 | 2.762.490.892 | - | - | 91% | 86% | 99% | - | - | -14% | -17% |
| Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah | 13098271527 | 22970358476 | 28.164.848.065 | - | - | 11235264860 | 18885105532 | 26.328.867.677 | - | - | 86% | 82% | 93% | - | - | 49% | 54% |
| Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah | 480787373 | 584762918 | 244.275.320 | - | - | 355352244 | 364376643 | 229.330.350 | - | - | 74% | 62% | 94% | - | - | -18% | -17% |
| Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan | 28021909553 | 27144465925 | 11.352.403.330 | - | - | 26947752715 | 25474916095 | 10.950.120.334 | - | - | 96% | 94% | 96% | - | - | -31% | -31% |
| Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan | - | 116748400 | 89.628.200 | - | - | - | 89425661 | 68.729.300 | - | - | - | 77% | 77% | - | - | -23% | -23% |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| Program pembinaan dan Pengembangan Industri | - | - | 12.334.861.750 | - | - | - | - | 12.067.294.316 | - | - | - | - | 98% | - | - | - | - |
| Program Pengawasan dan Pengendalian Industri | - | - | 1591703151 | - | - | - | - | 1337510310 | - | - | - | - | 84% | - | - | - | - |
| Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian | - | - | 7683899556 | - | - | - | - | 7320874892 | - | - | - | - | 95% | - | - | - | - |
| Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | - | - | - | 6519007644 | 7195409679 | - | - | - | 6.319.488.106 | N/A | - | - | - | 97% | N/A | 10% | - |
| Program Pengembangan Ekspor | - | - | - | 4645575028 | 24799077115 | - | - | - | 3.987.269.493 | N/A | - | - | - | 86% | N/A | 434% | - |
| Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | - | - | - | - | 8584064979 | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | N/A | - | - |
| Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | - | - | - | 149760000 | 241760000 | - | - | - | 144.975.000 | N/A | - | - | - | 97% | N/A | 61% | - |
| Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | - | - | - | 1580999221 | - | - | - | - | 1552391083 | N/A | - | - | - | 98% | N/A | - | - |
| Program Pengembangan UMKM | - | - | - | 137087000 | 22617024447 | - | - | - | 136745000 | N/A | - | - | - | 100% | N/A | 16398% | - |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | - | - | - | 27029289259 | 36977187951 | - | - | - | 25933680955 | N/A | - | - | - | 96% | N/A | 37% | - |
| Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | - | - | - | 21764275270 | 16841322017 | - | - | - | 21504822458 | N/A | - | - | - | 99% | N/A | -23% | - |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 21249891880 | - | - | - | - | 20704329084 | - | - | - | - | 97% | - | - | - |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | - | - | - | 155023518235 | 48845436845 | - | - | - | 150370557121 | N/A | - | - | - | 97% | N/A | -68% | - |
| Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | - | - | - | 324800000 | 585030352 | - | - | - | 319200000 | N/A | - | - | - | 98% | N/A | 80% | - |

*Sumber: Renstra DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 2018-2022*

Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tidak akan dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan anggran. Pada tabel 2.6 disajikan perkembangan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2021. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa secara rata-rata rasio serapan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018-2021 adalah sebesar 89%. Rasio serapan anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 96%. Tingginya serapan anggaran tersebut karena adanya pandemi covid yang membuat anggaran dioptimalisasi atau direfocusing, sehingga anggaran APBDP dapat dilaksanakan secara optimal. Namun, masih ada beberapa Rincian Sub Kegiatan yang penyerapannya kurang dari 60%.

## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
   a. Kekuatan
      1) Seluruh jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta mempunyai komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan sinergi di internal Dinas.

2) Tingginya inovasi dari kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM
3) Adanya upaya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek
4) Tersedianya anggaran yang proposional
5) Posisi Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional

b. Kelemahan

1) Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses permodalan, pengembangan produk maupun akses pasar
2) Perlindungan terhadap pelaku UKM tidak optimal, hal ini terlihat dari pertumbuhan pasar modern di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang cukup pesat dan akan semakin lama mengancam posisi pasar tradisional
3) Keterbatasan Penyediaan ruang bagi sektor informal/ ukm pada kawasan perkantoran dan perdagangan
4) Lemahnya penguasaan teknologi industri pelaku IKM
5) Perlindungan HKI masih kurang optimal karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan HKI

2. Faktor Eksternal

i. Peluang

1) Perkembangan teknologi dan informasi yang memberikan kemudahan sehingga mempunyai peluang mengembangkan pelayanan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2) Lingkungan dan ekosistem yang mendukung sehingga mendorong masyarakat semangat berwirausaha dan membuka usaha baru

3) Berbagai kesepakatan perdagangan bebas membuka peluang Provinsi DKI Jakarta ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional
4) Penyelenggaraan event berskala regional, nasional dan internasional di Provinsi DKI Jakarta
5) Keberadaan Perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jabodetabek dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku-pelaku IKM/UKM di Provinsi DKI Jakarta

ii. Tantangan

1) Kebijakan pemerintah yang tumpang tindih dan sering berubah
2) Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah, maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.
3) Maraknya peredaran barang ilegal dan tidak SNI
4) Imbas krisis finansial global yang disebabkan oleh perang antar negara
5) Liberalisasi perdagangan pasar yang seringkali merugikan pelaku UKM dan IKM
6) Adanya perdagangan internasional sehingga meningkatkan persaingan karena adanya produk dari luar negeri

Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

# Bab III

## Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

# BAB III
# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam P eraturan Gubernur DKI Jakarta No 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka Kepala Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta membantu Gubernur untuk mengemban kewenangan di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi untuk menyelenggarakan:

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
e. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan

f. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
g. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
h. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi dan sarana distribusi perdagangan;
i. pengoordinasian penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
j. pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
k. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
l. pelaksanaan promosi perdagangan dan pencitraan produk ekspor;
m. pelaksanaan fasilitasi ekspor impor;
n. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal;
o. pelaksanaan perlindungan konsumen;
p. pelaksanaan pengujian, inspeksi dan sertifikasi mutu produk;
q. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
r. pelaksanaan kemetrologian berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
s. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi;
t. pengawasan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
u. pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;

v. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah,
w. pelaksanaan pendampingan perlindungan hak kekayaan intelektual;
x. pelaksanaan pendampingan sertifikasi produk-produk industri;
y. pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
z. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
aa. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evauasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
bb. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang dberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

| Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| Rendahnya produktivitas dan daya saing perindustrian dalam mendukung perekonomian daerah | Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan industri sektor industri yang berbasis nilai tambah | Kurangnya fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah terutama pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dalam |

| Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | | penggunaan teknologi produksi, peningkatan kualitas produk dan pemasaran |
| | | Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra Industri potensial |
| Rendahnya produktivitas dan daya saing perdagangan dalam mendukung perekonomian daerah | Rendahnya nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam dan luar negeri | Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan perdagangan |
| | | Belum efektifnya promosi dan pemasaran produk-produk unggulan |
| | | Rendahnya kualitas pengawasan dan pengendalian terhadap barang beredar dan jasa |
| | | Belum optimalnya kerjasama perdagangan internasional |
| | | Rendahnya kinerja BPSK terutama kualitas SDM dalam penanganan kasus/sengketa konsumen |
| | | Pasar tradisional kalah bersaing dengan pasar retail modern dalam hal sarana prasarana kenyamaan konsumen |
| Belum optimalnya peran koperasi dan UKM sebagai aktor utama dalam mencapai kemandirian perekonomian | Rendahnya kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UKM | Kurang optimalnya pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan UKM |
| | | Minimnya pengelolaan sarana dan prasarana |

| Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| daerah | | Kurangnya pembinaan dan pelatihan usaha informal |
| | | Rendahnya literasi digital pelaku UMKM |
| | Rendahnya kuantitas dan kualitas koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat | Kurang optimalnya pembinaan, pemberdayaan, perencanaan, pengembangan dan perlindungan koperasi |
| | | Kurangnya kapasitas kelembagaan koperasi |
| | | Masih belum maksimalnya pengelolaan, perluasan akses pembiayaan serta penyelesaian permasalahan dana bergulir koperasi |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta 2022, diolah*

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 mencerminkan visi dan misi selama 20 tahun yang tertuang dalam RPJPD. Visi jangka panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005 – 2025 adalah: **"Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global".**

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah.

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung

pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

2. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.
4. Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.
5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang

memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 dari RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta berperan untuk **Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat**. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta**

| No | Misi | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|---|---|---|---|
| 1 | Misi ke 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat | 1. Tingginya inovasi dari kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM<br>2. Lingkungan dan ekosistem yang mendukung sehingga mendorong masyarakat semangat berwirausaha dan membuka usaha baru<br>3. Berbagai kesepakatan perdagangan bebas membuka peluang Provinsi DKI Jakarta ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional | 1. Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses permodalan, pengembangan produk maupun akses pasar<br>2. Lemahnya penguasaan teknologi industri pelaku IKM<br>3. Liberalisasi perdagangan pasar yang seringkali merugikan pelaku UKM dan IKM<br>4. Adanya perdagangan internasional sehingga meningkatkan persaingan karena adanya produk dari luar negeri |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta 2022, diolah*

## 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Perindustrian

Sebagai upaya menjamin konsistensi dan keselarasan perencanaan pusat-daerah, maka perlu ditelaah isu strategis dan permasalahan di dalam renstra K/L. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta merujuk pada Renstra Kementrian Perindustrian Tahun 2020-2024 yang tertuang pada Peraturan

Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024. Berikut adalah penjabarannya :

**Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024**

| Sasaran Renstra K/L | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | Pendukung | Penghambat |
| Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas | 1. Belum adanya roadmap/modul pelatihan untuk perusahaan industri besar maupun IKM<br>2. Alat produksi yang tidak sesuai standar<br>3. Pemasaran produk yang tidak efisien dan efektif<br>4. Regulasi yang masih kurang mendukung<br>5. Kurangnya fasilitasi pembiayaan | 1. Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Unit Pengelola Pusat Pendidikan dan Latihan yang akan menjadi *leading sector* penyusunan modul pelatihan.<br>2. Adanya komitmen yang kuat dari internal DPPKUKM untuk pengembangan industri<br>3. Adanya Kerjasama dengan Bank DKI untuk fasilitasi pembiayaan | 1. Keterbatasan dan *refocusing* APBD sehingga penyusunan modul pelatihan belum bisa terlaksana.<br>2. keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menangani pelatihan<br>3. keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan yang ada saat ini |

| Sasaran Renstra K/L | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | Pendukung | Penghambat |
| Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 | 1. Lemahnya penguasaan teknologi industri pelaku IKM<br>2. Sulitnya memantau pertumbuhan startup berbasis teknologi | 1. Adanya upaya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek<br>2. Perkembangan teknologi dan informasi yang memberikan kemudahan sehingga mempunyai peluang mengembangkan pelayanan pada DPPKUKM<br>3. Banyaknya IKM startup berbasis teknologi di Provinsi DKI Jakarta | 1. Pelatihan digital masih kurang menyeluruh dan berkualitas<br>2. Kurangnya literasi digital SDM Perindustrian<br>3. Banyaknya IKM startup berbasis teknologi yang belum memiliki perizinan berusaha sehingga menyulitkan untuk melakukan pemetaan awal. |
| Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri | Banyaknya perusahaan yang belum memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) | 1. Pusat P3DN Kementerian Perindustrian siap mendukung Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jumlah Sertifikasi TKDN.<br>2. Adanya bantuan | 1. Perusahaan industri tidak memahami manfaat dari Sertifikasi TKDN.<br>2. Perusahaan tidak berminat mengikuti sosialisasi sertifikasi TKDN karena merasa tidak |

| Sasaran Renstra K/L | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | **Pendukung** | **Penghambat** |
| | | fasilitasi yang disediakan Kementerian Perindustrian untuk Sertifikasi TKDN. | membutuhkan sertifikat TKDN. |
| Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri | Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha dalam penggunaan teknologi produksi, peningkatan kualitas produk dan pemasaran | 1. Tersedianya anggaran yang proposional<br>2. Lingkungan dan ekosistem yang mendukung sehingga mendorong masyarakat semangat berwirausaha dan membuka usaha baru<br>3. Tingginya inovasi dari kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor perindustrian | 1. Kurangnya fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah<br>2. Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses permodalan, pengembangan produk maupun akses pasar |
| Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) | Kurangnya kemitraan antara industri besar dengan industri kecil dan menengah (IKM) | Banyaknya perusahaan industri besar di Provinsi DKI Jakarta | Kualitas produk IKM yang belum memenuhi standar membuat perusahaan industri besar enggan bermitra dengan IKM. |

| Sasaran Renstra K/L | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | Pendukung | Penghambat |
| Meningkatnya Persebaran Industri | Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan industri sektor industri yang berbasis nilai tambah | 1. Berbagai kesepakatan perdagangan bebas membuka peluang Provinsi DKI Jakarta ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional<br>2. Adanya upaya pengembangan sentra-sentra Industri potensial | 1. Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah, maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar<br>2. Adanya perdagangan internasional sehingga meningkatkan persaingan karena adanya produk dari luar negeri |
| Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal | Pembangunan Sistem Infomasi Industri Daerah (SIIDa) masih belum terlaksana. | Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Unit Pengelola Pusat Data dan Informasi yang akan menjadi leading sector pembangunan SIIDa | Sarana dan prasarana untuk pembangunan SIIDa belum tersedia |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta 2022, diolah*

### 3.3.2 Telaahan Renstra Kementrian Perdagangan

Sebagai upaya menjamin konsistensi dan keselarasan perencanaan pusat-daerah, maka perlu ditelaah isu strategis dan permasalahan di dalam renstra K/L. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta merujuk pada Renstra Kementrian Perdagangan Tahun 2020-2024 yang tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024. Berikut adalah penjabarannya :

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024**

| Sasaran Renstra K/L | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | Pendukung | Penghambat |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa | Belum optimalnya pangsa pasar barang non migas yang bernilai tambah dan jasa | 1. Adanya berbagai kesepakatan perdagangan bebas membuka peluang Provinsi DKI Jakarta ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional<br>2. Adanya penyelenggaraan event berskala | 1. Kurangnya pembinaan dan pengembangan perdagangan<br>2. Kurang optimalnya kualitas promosi dan pencitraan produk ekspor |

| Sasaran Renstra K/L | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | **Pendukung** | **Penghambat** |
| | | regional, nasional dan internasional di Provinsi DKI Jakarta | |
| Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok | Belum adanya persamaan atau standarisasi harga barang kebutuhan pokok | 1. Tersedianya Program Pangan Murah dan Aplikasi Sistem Informasi Pangan Bersubsidi untuk memastikan keterjangkauan harga pangan<br>2. Adanya kerjasama dengan daerah penghasil untuk memastikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok | 1. Tingginya biaya distribusi Barang Kebutuhan Pokok<br>2. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah |
| Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab | Rendahnya kinerja BPSK terutama kualitas SDM dalam penanganan kasus/sengketa konsumen | Adanya upaya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek | Maraknya peredaran barang ilegal dan tidak SNI |

| Sasaran Renstra K/L | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | Pendukung | Penghambat |
| Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri | Belum efektifnya promosi dan pemasaran produk-produk unggulan | 1. Lingkungan dan ekosistem yang mendukung sehingga mendorong masyarakat semangat berwirausaha dan membuka usaha baru<br>2. Berbagai kesepakatan perdagangan bebas membuka peluang Provinsi DKI Jakarta ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional | 1. Liberalisasi perdagangan pasar yang seringkali merugikan pelaku UKM dan IKM<br>2. Masih rendahnya promosi dan pemasaran produk dalam negeri serta produk-produk unggulannya |
| Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) | Belum optimalnya sinergi industri PBK, SRG dan PLK dalam menghadapi era perdagangan digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional | 1. Adanya upaya meningkatkan daya saing perdagangan melalui optimalisasi pemanfaatan PBK sebagai sarana pengelolaan risiko, | 1. Belum adanya updating dan upgrade sistem pengawasan transaksi perdagangan berjangka komoditi mengikuti |

| Sasaran Renstra K/L | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | **Pendukung** | **Penghambat** |
| | | referensi harga, dan sarana investasi<br>2. Adanya upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui percepatan implementasi SRG sebagai sarana tunda jual dan alternatif pembiayaan bagi petani, UKM, koperasi, dan pelaku usaha<br>3. Adanya upaya meningkatkan efisiensi mata rantai perdagangan dan menciptakan sarana pembentukan harga melalui PLK | perkembangan teknologi informasi<br>2. Rendahnya partisipasi investor terhadap produk-produk berjangka |

| Sasaran Renstra K/L | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | Pendukung | Penghambat |
| Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan | Belum optimalnya kemampuan dan khasanah SDM Perdagangan di era perdagangan *digital* | 1. Adanya upaya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek<br>2. Perkembangan teknologi dan informasi yang memberikan kemudahan sehingga mempunyai peluang mengembangkan pelayanan pada DPPKUKM | 1. Pelatihan digital masih kurang menyeluruh dan berkualitas<br>2. Kurangnya literasi digital SDM Perdagangan |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta 2022, diolah*

### 3.3.3 Telaahan Renstra Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sebagai upaya menjamin konsistensi dan keselarasan perencanaan pusat-daerah, maka perlu ditelaah isu strategis dan permasalahan di dalam renstra K/L. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta merujuk pada Renstra Kementrian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 yang tertuang pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024. Berikut adalah penjabarannya :

**Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020-2024**

| Sasaran Renstra K/L | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | Pendukung | Penghambat |
| Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju | 1. Rendahnya kuantitas dan kualitas koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat<br>2. Belum adanya fasilitasi pemakaian sistem / aplikasi untuk manajemen koperasi melalui digital | 1. Tingginya inovasi dari kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor<br>2. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat mendukung digitalisasi koperasi<br>3. Keberadaan Perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jabodetabek dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan koperasi | 1. Kurangnya kapasitas kelembagaan koperasi<br>2. Masih belum maksimalnya pengelolaan, perluasan akses pembiayaan serta penyelesaian permasalahan dana bergulir koperasi<br>3. Kegiatan Perkoperasian belum memiliki payung hukum daerah |
| Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global | Masih rendahnya kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UKM | 1. Lingkungan dan ekosistem yang mendukung sehingga mendorong masyarakat semangat | 1. Liberalisasi perdagangan pasar yang seringkali merugikan pelaku UKM dan IKM<br>2. Adanya |

| Sasaran Renstra K/L | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | **Pendukung** | **Penghambat** |
| | | berwirausaha dan membuka usaha baru<br>2. Penyelenggaraan event berskala regional, nasional dan internasional di Provinsi DKI Jakarta<br>3. Keberadaan Perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jabodetabek dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendamping UKM | perdagangan internasional sehingga meningkatkan persaingan karena adanya produk dari luar negeri<br>3. Masih rendahnya pengawasan akan pelanggaran Hak Cipta |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta 2022, diolah*

## 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ditinjau

dari implikasi RTRW yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 untuk urusan bidang perdagangan, urusan bidang perindustrian serta urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah tertuang pada pasal-pasal serta program unggulan RTRW, berikut adalah kutipan Pasal pada Perda RTRW Provinsi DKI Jakarta:

**Pasal 6**

*(1) Untuk menciptakan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:*

*a. pengembangan kawasan pusat kegiatan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing kota Jakarta;*

*b. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas di pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan sesuai standard yang ditetapkan;*

*c. peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi di sektor perdagangan, jasa, industri kreatif, industri teknologi tinggi dan pariwisata; dan*

d. *penetapan kawasan strategis ekonomi dan kawasan strategis sosial budaya.*

**Pasal 7**

*(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:*

*a. mengembangkan pusat kegiatan baru secara hierarkis;*

*b. mengembangkan pusat kegiatan pada simpul angkutan umum massal melalui konsep Transit Oriented Development (TOD);*

*c. mengembangkan kawasan perkantoran, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan pariwisata dalam skala regional, nasional, dan internasional; dan*

d. *meningkatkan kualitas pasar tradisional serta prasarana dan sarana sosial sebagai pusat kegiatan berskala lokal.*

**Pasal 119 ayat (3)**

*Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:*

a. *pembangunan kembali dan perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dan jasa dengan menyediakan ruang bagi pengusaha ekonomi lemah serta penataan terminal penumpang secara terpadu dengan angkutan kereta api di Stasiun Senen;*
b. *pembangunan kembali fasilitas perdagangan dan jasa dengan peningkatan sarana perparkiran serta penyediaan sarana dan prasarana pejalan kaki di Kawasan Senen dan Kawasan Tanah Abang;*
c. *peremajaan pasar lama dan pengaturan moda angkutan umum di kawasan Bendungan Hilir;*
d. *pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanan di Kawasan Bendungan Hilir;*
e. *pengembangan kawasan multifungsi bertaraf internasional di Gambir, Tanah Abang, Sawah Besar, Senen, dan Kemayoran;*
f. *pengembangan pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dengan menyediakan fasilitas umum yang memadai di Gambir, Tanah Abang, Sawah Besar, Senen, Cempaka Putih, Johar Baru, dan Kemayoran; dan*
g. *pengembangan pusat perdagangan yang terintegrasi dengan penataan kawasan sekitarnya di Gambir, Tanah Abang, Sawah Besar, Senen, Cempaka Putih, Johar Baru, dan Kemayoran.*

**Pasal 141 ayat (3)**

*Rencana pengembangan kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut:*

a. *penataan Kawasan Kota Tua dengan penyediaan fasilitas parkir, pejalan kaki, taman, dan pengembangan sarana perdagangan dan jasa pariwisata di Kecamatan Tambora dan Mangga besar - Taman Sari , Glodok – Pancoran, dan Jembatan Lima dengan penyediaan fasilitas parkir, pejalan kaki, taman, sarana perdagangan dan jasa pariwisata;*
b. *pembangunan Sentra Primer Barat sebagai pusat perdagangan dan perkantoran bertaraf internasional serta pusat pelayanan pemerintah kota administrasi;*
c. *penataan perdagangan KDB rendah di koridor Sungai Pesanggrahan dan Kali Grogol, Kali Angke, Kali Besar, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, Cengkareng Drain;*
d. *pengembangan perdagangan dengan KDB rendah di lokasi Grogol Petamburan, Kebon Jeruk, Kembangan, Cengkareng, Kalideres, dan Pal Merah;*
e. *pengembangan perdagangan dengan KDB rendah terbatas untuk pelayanan tingkat kecamatan;*
f. *pengembangan program perbaikan lingkungan di kawasan yang terbangun dengan penyediaan dan/atau penambahan fasilitas penunjang beserta penghijauan yang lebih nyaman;*
g. *pengembangan fasilitas perdagangan terutama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanannya;*
h. *pelestarian dan penataan fungsi kawasan kota tua/bersejarah untuk mendukung kegiatan perdagangan jasa dan pariwisata dengan pengaturan dan penataan lalu lintas beserta pedestrian yang lebih nyaman;*
i. *pembatasan pengembangan perdagangan, jasa, dan perkantoran di sepanjang jalan kolektor; dan*

j. *perbaikan lingkungan pasar lama dengan peningkatan sarana dan prasarana pejalan kaki;*
k. *pembangunan pasar induk baru sebagai pusat distribusi bahan pangan terpadu dengan sistem transportasi di Rawa Buaya; dan*
l. *pengembangan Sentra Usaha Kecil Menengah di Rawa Buaya, Cengkareng.*

Selain itu, pada urusan Bidang Perdagangan, urusan bidang Perindustrian, dan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Perda RTRW Perda Provinsi DKI Jakarta masuk pada Program Utama RTRW Provinsi DKI Jakarta, yakni sebagai berikut:

**2.3 Kawasan Industri dan Pergudangan**

*2.3.1 Penataan kawasan pelabuhan sebagai bagian integral dari penataan kawasan industri dan pergudangan, serta perniagaan kota*

*2.3.2 Mengembangkan kawasan industri yang dibatasi hanya untuk jenis industri yang hemat penggunaan lahan, air dan energi, tidak berpolusi, memperhatikan aspek lingkungan dan menggunakan teknologi tinggi*

*2.3.3 Pengembangan industri perakitan di kawasan sekitar Bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok*

*2.3.4 Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis sebagai bagian integral dari pengembangan Pelabuhan*

*2.3.5 Pengembangan kawasan industri dengan memperhatikan daya dukung transportasi dan infrastruktur lainnya.*

**2.12 Kawasan Sektor Informal**

*2.12.1 Pengembangan dan pemeliharaan kawasan pusat pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah*

*2.12.2 Pembangunan pusat industri kecil dan menengah untuk menampung industri yang berada di permukiman dan mencemari lingkungan*

*2.12.3 Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan pusat perniagaan dan perkantoran*

**Tabel 3.6. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditinjau dari implikasi RTRW**

| Telaah RTRW terkait Tupoksi | Permasalahan Pelayanan | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|---|---|---|---|
| 1. Penataan perdagangan KDB rendah di koridor Sungai Pesanggrahan dan Kali Grogol, Kali Angke, Kali Besar, Kali Krukut, Kanal Banjir Barat, Cengkareng Drain<br>2. Pengembangan perdagangan dengan KDB rendah di lokasi Grogol Petamburan, Kebon Jeruk, Kembangan, Cengkareng, Kalideres, dan Pal Merah<br>3. Pengembangan perdagangan dengan KDB rendah terbatas untuk pelayanan | Pertumbuhan sektor informal terkadang melebihi kapasitas yang disediakan ataupun areal yang disediakan selama ini sehingga pengembangan daya tampung harus disesuikan dengan kebijakan instansi lainnya. | 1) Disetujuinya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2011- 2030 menjadi Perda oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang akan menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi DKI Jakarta untuk 20 tahun ke depan.<br>2) Komitmen dari Pemerintah Kota Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan Kota DKI menjadi kota | 1. Keterbatasan lahan dalam pengembangan sektor informal dan daya tamping yang tersedia di Provinsi DKI Jakarta, terutama di daerah yang strategis dan sesuai pasar<br>2. Masih kurang baiknya koordinasi antar dinas terkait koordinasi pengembangan lahan untuk sektor informal dan usaha kecil.<br>3. Masih terbatasnya pusat distribusi untuk bahan kebutuhan |

| Telaah RTRW terkait Tupoksi | Permasalahan Pelayanan | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|---|---|---|---|
| tingkat kecamatan<br>4. Pengembangan fasilitas perdagangan terutama untuk pasar tradisional sesuai kebutuhan dan jangkauan pelayanannya<br>5. Perbaikan lingkungan pasar lama dengan peningkatan sarana dan prasarana pejalan kaki<br>6. Pembangunan pasar induk baru sebagai pusat distribusi bahan pangan terpadu dengan sistem transportasi di Rawa Buaya<br>7. Pengembangan Sentra Usaha Kecil Menengah di Rawa Buaya, Cengkareng<br>8. Pengembangan dan pemeliharaan kawasan pusat pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah<br>9. Pembangunan | | yang nyaman, adil dan berkelanjutan bagi penduduknya, yang di implementasikan dalam misi kerjanya. | pokok |

| Telaah RTRW terkait Tupoksi | Permasalahan Pelayanan | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|---|---|---|---|
| pusat industri kecil dan menengah untuk menampung industri yang berada di permukiman dan mencemari lingkungan<br>10. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari pengembangan pusat perniagaan dan perkantoran | | | |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta 2022, diolah*

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti.

Adapun tahapan perumusan isu strategis Renstra DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 melalui tahapan penentuan dan pembobotan. Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis didasarkan pada kriteria-kriteria berikut: (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian

sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Nilai skala pengukuran terhadap kriteria dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.7. Skala Penilaian Metode Rating**

| Level Pengaruh | Skala Penilaian (*Range Scale*) |
|---|---|
| Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional | 25 |
| Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah | 15 |
| Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat | 30 |
| Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah | 20 |
| Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani | 10 |
| Total | 100 |

*Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017*

Tabel di atas adalah tabel pembobotan dengan metode rating yang dilakukan terhadap daftar panjang identifikasi isu strategis DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini adalah beberapa isu strategis yang harus dijawab oleh DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta:

**Tabel 3.8. Penentuan Prioritas Isu Strategis**

| No | Isu Strategis | Telaah Kriteria | | | | | Total Skor | Ranking Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | | |
| 1 | Peningkatan kapasitas pelaku industri kecil dan menengah | 25 | 15 | 30 | 20 | 10 | 100 | 1 |

| No | Isu Strategis | Telaah Kriteria | | | | | Total Skor | Ranking Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | | |
| 2 | Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sentra-sentra Industri potensial | 20 | 15 | 30 | 20 | 8 | 93 | 6 |
| 3 | Pertumbuhan Pelaku Industri Kecil dan Menengah | 25 | 15 | 30 | 20 | 10 | 100 | 2 |
| 4 | Peningkatan pelaku industri yang terstandarisasi | 20 | 15 | 25 | 18 | 7 | 85 | 17 |
| 5 | Optimalisasi promosi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah | 25 | 15 | 30 | 18 | 10 | 98 | 4 |
| 6 | Upaya peningkatan kerjasama perdagangan internasional | 25 | 15 | 25 | 18 | 8 | 91 | 13 |
| 7 | Peningkatan nilai ekspor daerah | 25 | 15 | 25 | 20 | 8 | 93 | 7 |
| 8 | Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian terhadap barang beredar dan jasa | 25 | 15 | 20 | 15 | 10 | 85 | 18 |
| 9 | Meningkatkan kapasitas dan kualitas penanganan keluhan konsumen | 25 | 15 | 20 | 15 | 10 | 85 | 19 |
| 10 | Meningkatkan kapasitas pasar tradisional | 25 | 15 | 30 | 20 | 7 | 97 | 5 |
| 11 | Stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok | 25 | 15 | 30 | 15 | 7 | 92 | 12 |
| 12 | Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan | 25 | 15 | 30 | 20 | 10 | 100 | 3 |

| No | Isu Strategis | Telaah Kriteria | | | | | Total Skor | Ranking Prioritas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | | |
| 13 | Peningkatan jumlah koperasi berkualitas | 20 | 15 | 25 | 20 | 7 | 87 | 16 |
| 14 | Peningkatan jumlah koperasi yang memiliki NIK | 15 | 15 | 20 | 15 | 8 | 73 | 21 |
| 15 | Peningkatan jumlah koperasi aktif | 15 | 15 | 20 | 15 | 8 | 73 | 20 |
| 16 | perluasan akses pembiayaan serta penyelesaian permasalahan dana bergulir koperasi | 10 | 15 | 25 | 10 | 8 | 68 | 22 |
| 17 | Peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah | 20 | 15 | 30 | 20 | 8 | 93 | 8 |
| 18 | Peningkatan kualitas produk usaha kecil dan menengah | 20 | 15 | 30 | 20 | 8 | 93 | 9 |
| 19 | Peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah | 20 | 15 | 30 | 20 | 8 | 93 | 10 |
| 20 | Peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah | 20 | 15 | 30 | 20 | 8 | 93 | 11 |
| 21 | Penguatan kapasitas kelembagaan usaha kecil dan menengah | 20 | 15 | 30 | 20 | 6 | 91 | 14 |
| 22 | Peningkatan literasi digital pelaku UMKM | 20 | 15 | 30 | 20 | 5 | 90 | 15 |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta 2022, diolah*

Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

# Bab IV
## Tujuan dan Sasaran

# BAB IV
# TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam RPJPD yaitu "*Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global*" dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah termasuk dalam Misi ke-2 yakni "*Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat*".

Visi dan misi dalam RPJPD yang telah ditetapkan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam waktu 4 (empat) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah | | Kontrbusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah | 12,28 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,6 |
| | | Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan | Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian | 11,01 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 |
| 2 | Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah | | Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan | 16,85 | 16,9 | 17 | 17,1 | 17,2 | 17,2 |
| | | Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | 5,46 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
| 3 | Peningkatan Resiliensi | | Persentase Pertumbuhan | 52 | 4,5 | 5 | 5,25 | 5,5 | 5,5 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | | Pelaku UMKM | | | | | | |
| | | Penumbuhan Nilai –Nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi | Jumlah Koperasi yang berkualitas | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
| | | | Persentase Pelaku UMKM yang meningkatkan Kapasitasnya | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta 2022, diolah*

**Gambar 4.1.** Cascading Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

**Gambar 4.2.** Cascading Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Perindustrian Provinsi DKI Jakarta

**Gambar 4.3.** Cascading Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

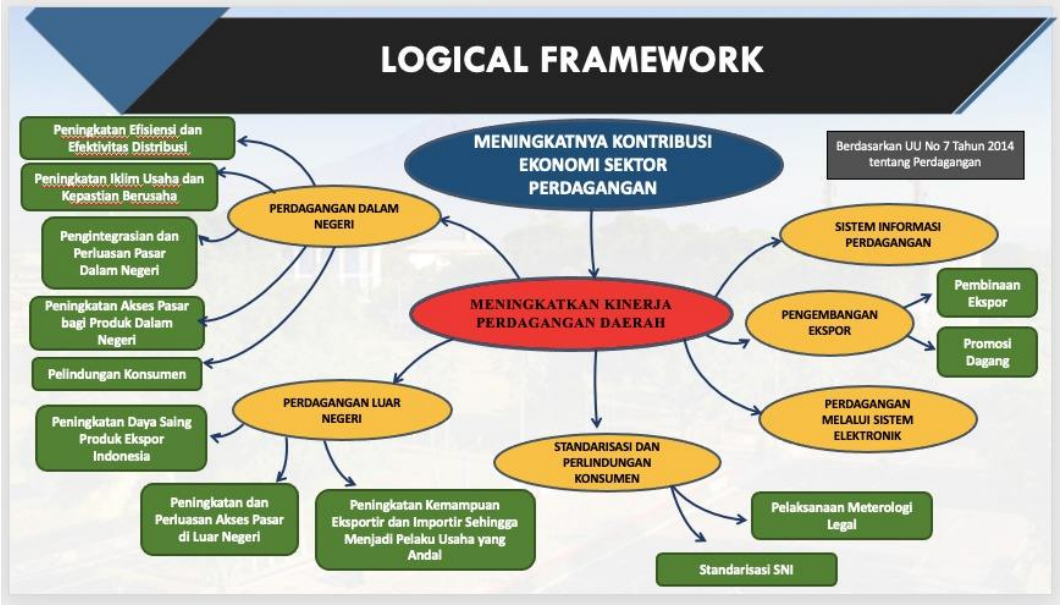


**Gambar 4.4.** *Logical Framework* Pengembangan Perdagangan

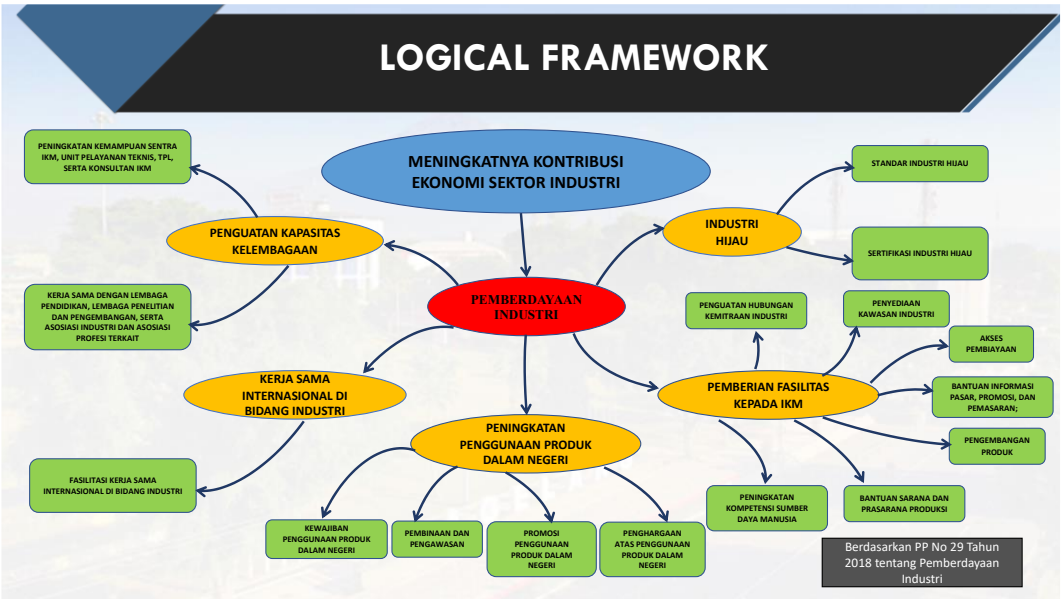


**Gambar 4.5.** *Logical Framework* Pemberdayaan Perindustrian

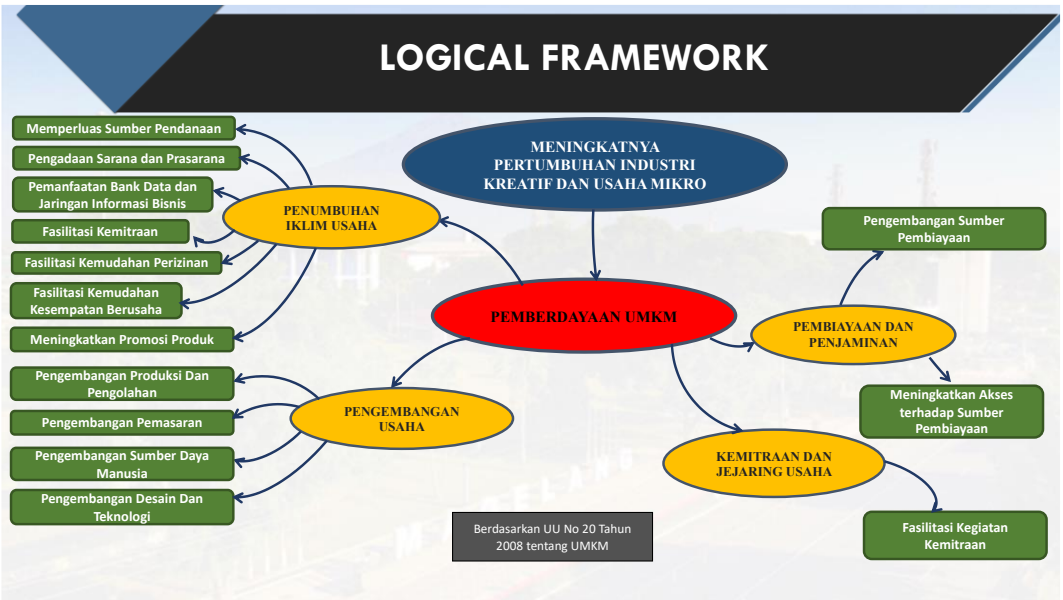


**Gambar 4.6.** *Logical Framework* Pemberdayaan UMKM

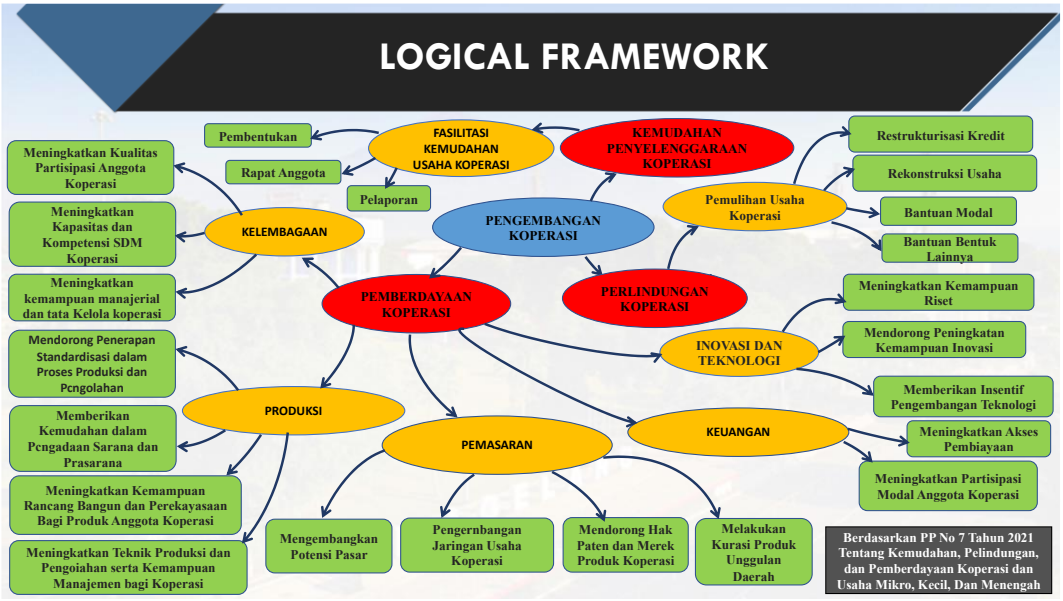


**Gambar 4.7.** *Logical Framework* Pengembangan Koperasi

Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

# Bab V

## Strategi dan Arah Sasaran

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

# BAB V
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama 4 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungdan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Perumusan strategi DPPKUKM dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi capaian periode sebelumnya dan analisis faktor internal maupun faktor eksternal berdasarkan hasil telaah visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Analisis faktor-faktor internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sedangkan analisis faktor-faktor eksternal diperlukan untuk mengetahui peluang dan ancaman

yang dihadapi DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai tujuan pembangunan.

**Tabel 5.1. Matriks Analisis SWOT**

| Internal Factor Analysis / External Factor Analysis | Strength | Weakness |
|---|---|---|
| | 1. Seluruh jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta mempunyai komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan sinergi di internal Dinas.<br>2. Tingginya inovasi dari kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM<br>3. Adanya upaya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek<br>4. Tersedianya anggaran yang proposional<br>5. Posisi Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional | 1. Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses permodalan, pengembangan produk maupun akses pasar<br>2. Perlindungan terhadap pelaku UKM tidak optimal, hal ini terlihat dari pertumbuhan pasar modern di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang cukup pesat dan akan semakin lama mengancam posisi pasar tradisional<br>3. Keterbatasan penyediaan ruang bagi sektor informal/ ukm<br>4. Lemahnya penguasaan teknologi industri pelaku IKM<br>5. Perlindungan HKI masih kurang optimal karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan HKI |
| Opportunity | S-O Strategies | W-O Strategies |
| 1. Pesatnya Perkembangan teknologi dan informasi<br>2. Lingkungan dan ekosistem yang mendukung sehingga mendorong masyarakat semangat berwirausaha dan membuka usaha baru<br>3. Berbagai kesepakatan perdagangan membuka peluang akses pasar nasional maupun internasional<br>4. Penyelenggaraan event berskala regional, nasional dan internasional di Provinsi DKI Jakarta<br>5. Keberadaan Perguruan tinggi yang ada di Jabodetabek dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan IKM/UKM di Provinsi DKI Jakarta | 1. Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam dan luar negeri<br>2. Meningkatkan produktivitas industri pengolahan melalui peningkatan kapasitas usaha dan fasilitasi pengembangan usaha<br>3. Meningkatkan kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UKM<br>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat | 1. Penguatan kolaborasi dengan instansi dan pemangku kepentingan guna meningkatkan akses pasar dan kualitas produk UMKM<br>2. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam penggunaan teknologi melalui penguatan peran akademisi dan praktisi<br>3. Penguatan peran DPPKUKM dan perguruan tinggi dalam memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, khususnya dalam hal HKI<br>4. Memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah maupun antar negara sebagai upaya untuk meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha dan nilai ekspor Provinsi DKI Jakarta |

| Threat | S-T Strategies | W-T Strategies |
|---|---|---|
| 1. Kebijakan pemerintah yang tumpang tindih dan sering berubah<br>2. Persaingan usaha yang kurang sehat antar pelaku usaha<br>3. Maraknya peredaran barang ilegal dan tidak SNI<br>4. Imbas krisis finansial global yang disebabkan oleh perang antar negara<br>5. Liberalisasi perdagangan pasar yang seringkali merugikan pelaku UKM dan IKM<br>6. Adanya perdagangan internasional sehingga meningkatkan persaingan karena adanya produk dari luar negeri | 4. Melaksanakan koordinasi antar perangkat daerah dalam upaya harmonisasi kebijakan beserta saat implementasinya<br>5. Penguatan kapasitas SDM DPPKUKM dalam mencegah peredaran barang ilegal dan persaingan usaha yang tidak sehat<br>6. Optimalisasi anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kapasitas pasar tradisional dan pengembangan produk | 1. Melakukan penguatan tata kelola internal perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan<br>2. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran<br>3. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta 2022, diolah*

Berdasarkan tabel analisis di atas terlihat bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki peluang dan kekuatan yang bagus sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang direkomendasikan adalah strategi S-O atau *Growth Oriented Strategy* yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan langkah atau tindakan yang akan dilakukan. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| **Visi : Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global** | | | |
|---|---|---|---|
| **Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah | Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan | Meningkatkan produktivitas industri pengolahan melalui peningkatan kapasitas usaha dan fasilitasi pengembangan usaha | Peningkatan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah terutama pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dalam penggunaan teknologi produksi, peningkatan kualitas produk dan pemasaran |
| | | | Pengembangan sentra-sentra Industri potensial untuk akselerasi pertumbuhan industri unggulan |
| Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah | Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan | Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi sektor perdagangan dalam dan luar negeri | Peningkatan pembinaan dan pengembangan perdagangan |
| | | | Optimalisasi promosi dan pemasaran produk-produk unggulan |
| | | | Peningkatan |

| Visi : Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global | | | |
|---|---|---|---|
| **Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | | | kualitas pengawasan dan pengendalian terhadap barang beredar dan jasa |
| | | | Peningkatan daya saing produk diprioritaskan pada produk unggulan daerah dan peningkatan kerjasama perdagangan internasional |
| | | | Peningkatan kinerja BPSK terutama kualitas SDM dalam penanganan kasus/sengketa konsumen |
| | | | Peningkatan rehabilitasi dan penataan pasar tradisional dengan prioritas pada peningkatan sarana prasarana kenyamaan konsumen guna menghadapi |

| Visi : Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global | | | |
|---|---|---|---|
| **Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | | | penetrasi pasar retail modern. |
| Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | Penumbuhan Nilai – Nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi | Meningkatkan kuantitas, kapasitas, produktivitas dan profitabilitas UKM | Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan terutama pada aspek produksi, pemasaran dan permodalan usaha. |
| | | | Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana UKM |
| | | | Peningkatan pembinaan dan pelatihan usaha informal |
| | | | Peningkatan literasi digital pelaku UMKM |
| | | Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat | Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, perencanaan, pengembangan dan perlindungan koperasi |
| | | | Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi |
| | | | Memaksimalkan pengelolaan, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visi : Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global** | | | |
| **Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| | | | perluasan akses pembiayaan serta penyelesaian permasalahan dana bergulir koperasi |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta 2022, diolah*

Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

# Bab VI

## Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

# BAB VI
# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah program dan hasil *(output)* kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

## Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| TUMBUHNYA EKONOMI DAN SEKTOR USAHA BERBASIS PENGALAMAN DAN NILAI TAMBAH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENINGKATAN PERAN PERDAGANGAN DALAM PEREKONOMIAN DAERAH | | 1 | | PERSENTASE KONTRIBUSI PDRB SEKTOR PERDAGANGAN | 16,85 | 16,9 | 50.585.683.929 | 17 | 55.212.199.476 | 17,1 | 60.294.913.934 | 17,2 | 113.668.374.564 | 17,2 | 279.761.171.903 | | DKI JAKARTA |
| | PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN | 1.1 | | PERSENTASE PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERDAGANGAN | 5,46 | 5,6 | 50.585.683.929 | 5,7 | 55.212.199.476 | 5,8 | 60.294.913.934 | 5,9 | 113.668.374.564 | 5,9 | 279.761.171.903 | | DKI JAKARTA |
| | | 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase Pemanfaatan SKA | 58,38 | 60 | 600.000.000 | 61 | 650.000.000 | 62 | 705.000.000 | 63 | 765.500.000 | 63 | 2.720.500.000 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | **Persentase verifikasi permohonan Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan melalui Online Single Submission Risk Based Approached (OSS-RBA)** | 0 | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | 85 | | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | 3.30.02.1.02 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi | Persentase pelaku usaha yang difasilitasi perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 0 | 60 | 100.000.000 | 65 | 100.000.000 | 70 | 100.000.000 | 75 | 100.000.000 | 75 | 400.000.000 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.30.02.1.02.01 | Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan | 0 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 48 | 400.000.000 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | secara Elektronik | Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.30.02.1.04 | Penerbitan Surat KeteranganAsal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | Persentase pertumbuhan Eksportir Pemanfaat Surat Keterangan Asal(SKA) | 5 | 5 | 500.000.000 | 5 | 550.000.000 | 5 | 605.000.000 | 5 | 665.500.000 | 5 | 2.320.500.000 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.30.02.1.04.01 | Koordinasi dan SinkronisasiLayanan Penerbitan SKA | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | 250000 | 255000 | 500.000.000 | 257550 | 550.000.000 | 260126 | 605.000.000 | 262727 | 665.500.000 | 1035403 | 2.320.500.000 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Koefisien variasi harga barangkebutuhan pokok antar waktu | 14 | 14 | 30.000.000 | 14 | 30.000.000 | 14 | 35.000.000 | 14 | 35.000.000 | 14 | 130.000.000 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.30.04.1.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | Persentase hasil input ketersediaan barang kebutuhan pokok pada sistem Kemendag | 100 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 40.000.000 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRI | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | AN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.30.04.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | 6 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 48 | 40.000.000 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.30.04.1.02 | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Persentase input informasi harga barang kebutuhan pokok di sistem Kemendag | 100 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 90.000.000 | BIDANG PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.30.04.1.02.02 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokokyang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 3 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 20 | 90.000.000 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.30.05 | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **Nilai ekspor non migas DKI Jakarta** | 1120372000 | 11427794400 | 6.705.722.200 | 11542072344 | 7.376.294.420 | 11657493067 | 8.113.923.862 | 11774067998 | 8.925.316.248 | 11774067998 | 31.121.256.730 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | 3.30.05.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan | -0,0246 | 0,025 | 6.705.722.200 | 0,025 | 7.376.294.420 | 0,025 | 8.113.923.862 | 0,025 | 8.925.316.248 | 0,025 | 31.121.256.730 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | AN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.30.05.1.01.01 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 0 | 15 | 3.102.861.100 | 15 | 3.413.147.210 | 15 | 3.754.461.931 | 15 | 4.129.908.124 | 60 | 14.400.378.365 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | 3.30.05.1.01.02 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal | 100 | 250 | 3.102.861.100 | 250 | 3.413.147.210 | 250 | 3.754.461.931 | 250 | 4.129.908.124 | 1000 | 14.400.378.365 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.30.05.1.01.05 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yangDibina | 0 | 100 | 500.000.000 | 100 | 550.000.000 | 100 | 605.000.000 | 100 | 665.500.000 | 400 | 2.320.500.000 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | 18.970.110.955 | 100 | 20.677.122.051 | 100 | 22.554.834.255 | 100 | 24.620.317.681 | 100 | 86.822.384.942 | BIDANG PENGAWASAN | DKI JAKARTA |
| | | | | Persentase produk | 76 | 80 | | 81 | | 82 | | 83 | | 83 | | UNIT PENGELOLA | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | hasil uji yang sesuai syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya | | | | | | | | | | | | PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK<br>UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | Persentase Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | 3.30.06.1.01 | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Aktif | 100 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 6.000.000.000 | BIDANG PENGAWASAN | DKI JAKARTA |
| | | 3.30.06.1.01.01 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif | 1 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 6.000.000.000 | BIDANG PENGAWASAN | DKI JAKARTA |
| | | 3.30.06.1.02 | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Persentase hasil uji yang tepat waktu dan akurat | 76 | 80 | 15.270.674.496 | 81 | 16.797.741.946 | 82 | 18.477.516.140 | 83 | 20.325.267.754 | 83 | 70.871.200.336 | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM<br>UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | DKI JAKARTA |
| | | 3.30.06.1.02.02 | Pengembangan Layanan Pengujian | Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang | 5480 | 5520 | 15.270.674.496 | 5640 | 16.797.741.946 | 5760 | 18.477.516.140 | 5880 | 20.325.267.754 | 5880 | 70.871.200.336 | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK | DKI JAKARTA |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | 3.30.06.1.03 | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Persentase barang beredar dan jasa yang sesuai ketentuan | 50 | 55 | 400.000.000 | 60 | 400.000.000 | 65 | 400.000.000 | 70 | 400.000.000 | 70 | 1.600.000.000 | BIDANG PENGAWASAN | DKI JAKARTA |
| | | 3.30.06.1.03.01 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi | 1 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 4 | 1.600.000.000 | BIDANG PENGAWASAN | DKI JAKARTA |
| | | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Persentase pelaku usaha yang menggunakan metrologi legal yang diawasi | 3 | 3,01 | 1.799.436.459 | 3,02 | 1.979.380.105 | 3,03 | 2.177.318.115 | 3,04 | 2.395.049.927 | 3,04 | 8.351.184.606 | BIDANG PENGAWASAN | DKI JAKARTA |
| | | | | Persentase pelaksanaan hasil metrologi legal berupa tera dan teraulang pada alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya yang akurat | 87 | 90 | | 91 | | 92 | | 93 | | 93 | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | 3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 12800 | 12900 | 1.702.668.240 | 13000 | 1.872.935.064 | 13100 | 2.060.228.570 | 13200 | 2.266.251.427 | 13200 | 7.902.083.301 | UNIT PENGELOLA METROLOGI | DKI JAKARTA |
| | | 3.30.06.2.01.02 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 330 | 350 | 96.768.219 | 370 | 106.445.041 | 390 | 117.089.545 | 400 | 128.798.500 | 1510 | 449.101.305 | BIDANG PENGAWASAN | DKI JAKARTA |
| | | 3.30.07 | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya** | 15 | 20 | 24.279.850.774 | 30 | 26.478.783.005 | 40 | 28.886.155.817 | 50 | 79.322.240.635 | 50 | 158.967.030.231 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | 3.30.07.1.01 | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | Persentase pelaku usaha binaan yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri di tingkat Provinsi | 7 | 9 | 3.405.944.850 | 9 | 3.746.539.335 | 9 | 4.121.193.269 | 9 | 4.533.312.595 | 36 | 15.806.990.049 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | 3.30.07.1.01.01 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri | 46 | 55 | 3.405.944.850 | 55 | 3.746.539.335 | 55 | 4.121.193.269 | 55 | 4.533.312.595 | 220 | 15.806.990.049 | BIDANG PERDAGANGAN | DKI JAKARTA |
| | | 3.30.07.1.02 | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase pelaku usaha binaan yang terfasilitasi dalam Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | 6,79 | 8,1 | 4.585.614.176 | 9,41 | 4.585.614.176 | 10,72 | 4.585.614.176 | 12,03 | 4.585.614.176 | 12,03 | 18.342.456.704 | BIDANG PERDAGANGAN<br>BIDANG PERINDUSTRIAN<br>BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH | DKI JAKARTA |
| | | 3.30.07.1.02.01 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | 52 | 62 | 4.585.614.176 | 72 | 4.585.614.176 | 82 | 4.585.614.176 | 92 | 4.585.614.176 | 92 | 18.342.456.704 | BIDANG PERINDUSTRIAN<br>BIDANG PERDAGANGAN<br>BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH | DKI JAKARTA |
| | | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Persentase pelaku usaha binaan yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri di tingkat wilayah | 12,61 | 27,84 | 16.288.291.748 | 28,19 | 18.146.629.494 | 28,55 | 20.179.348.372 | 28,94 | 70.203.313.864 | 28,94 | 124.817.583.478 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS<br>SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN | DKI JAKARTA |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.30.07.2.01.01 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 5917 | 13060 | 16.288.291.748 | 13222 | 18.146.629.494 | 13393 | 20.179.348.372 | 13572 | 70.203.313.864 | 53247 | 124.817.583.478 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | DKI JAKARTA |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | JAKTIM | |
| **PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PENINGKATAN PERAN INDUSTRI DALAM PEREKONOMIAN DAERAH** | | | | **KONTRIBUSI SEKTOR PERINDUSTRIAN TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH** | **12,28** | **12,3** | **121.932.910.599** | **12,4** | **128.529.992.323** | **12,5** | **135.736.721.954** | **12,6** | **143.612.247.144** | **12,6** | **529.811.872.020** | | |
| | **PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING INDUSTRI BERWAWASAN LINGKUNGAN** | | | **PERSENTASE PERTUMBUHAN SEKTOR PERINDUSTRIAN** | **11,01** | **6,5** | **121.932.910.599** | **7** | **128.529.992.323** | **7,5** | **135.736.721.954** | **8** | **143.612.247.144** | **8** | **529.811.872.020** | | |
| | | 3.31.02 | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **Persentase Peningkatan Omzet Industri Kecil dan Menengah** | 2 | 3,5 | 121.762.267.099 | 4 | 128.342.284.473 | 4,5 | 135.530.243.319 | 5 | 143.385.120.645 | 5 | 529.019.915.536 | BIDANG PERINDUSTRIAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | | | Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya | 0 | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | | 65 | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | 3.31.02.1.01 | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Persentase Industri Kecil Menengah Berkualitas | 6,9 | 9,81 | 121.762.267.099 | 12,69 | 128.342.284.473 | 15,56 | 135.530.243.319 | 18,44 | 143.385.120.645 | 18,44 | 529.019.915.536 | BIDANG PERINDUSTRIAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KOTA - JAKTIM | |
| | | | | Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kreatif | 7,85 | 18,7 | | 37,4 | | 56,1 | | 74,79 | | 74,79 | | BIDANG PERINDUSTRIAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | Pertumbuhan Industri Berwawasan Lingkungan | 5 | 5 | | 10 | | 15 | | 20 | | 20 | | BIDANG PERINDUSTRIAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.31.02.1.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 | 1 | 26.161.303.286 | 1 | 26.178.803.286 | 1 | 26.200.678.286 | 1 | 26.228.021.286 | 4 | 104.768.806.144 | BIDANG PERINDUSTRIAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRI | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | AN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.31.02.1.01.05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan | 1 | 1 | 95.600.963.813 | 1 | 102.163.481.187 | 1 | 109.329.565.033 | 1 | 117.157.099.359 | 4 | 424.251.109.392 | BIDANG PERINDUSTRIAN | DKI JAKARTA |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | dan Peran Serta Masyarakat | Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.31.03 | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | **Persentase Industri Tertib Perizinan** | 50 | 55 | 170.643.500 | 60 | 187.707.850 | 65 | 206.478.635 | 70 | 227.126.499 | 70 | 791.956.484 | BIDANG PERINDUSTRIAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | BIDANG PENGAWASAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 3.31.03.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | Persentase Permohonan Izin yang Diterbitkan Berita Acara Verifikasi Teknis Pemenuhan Persyaratan | 50 | 100 | 170.643.500 | 100 | 187.707.850 | 100 | 206.478.635 | 100 | 227.126.499 | 100 | 791.956.484 | BIDANG PERINDUSTRIAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | BIDANG PENGAWASAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | Persentase izin industri yangdiawasi | 10 | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 30 | | BIDANG PENGAWASAN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | 3.31.03.1.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | 1 | 1 | 115.500.000 | 1 | 127.050.000 | 1 | 139.755.000 | 1 | 153.730.500 | 1 | 536.035.500 | BIDANG PERINDUSTRIAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | 3.31.03.1.01.02 | Koordinasi dan SinkronisasiPengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, danIPKI Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industridan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi | 30 | 30 | 55.143.500 | 30 | 60.657.850 | 30 | 66.723.635 | 30 | 73.395.999 | 120 | 255.920.984 | BIDANG PENGAWASAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| **MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA DAN ADAPTABILITAS TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PENINGKATAN RESILIENSI PEREKONOMIAN MELALUI PERAN KOPERASI DAN PEMBINAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH** | | | | **PERSENTASE PERTUMBUHAN PELAKU UMKM** | **52** | **4,5** | **333.789.550.647** | **5** | **363.438.693.173** | **5,25** | **397.375.804.202** | **5,5** | **435.416.530.234** | **5,5** | **1.530.020.578.256** | | |
| | **PENUMBUHAN NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN DALAM** | | | **JUMLAH KOPERASI YANG BERKUALITAS** | **200** | **50** | **333.789.550.647** | **50** | **363.438.693.173** | **50** | **397.375.804.202** | **50** | **435.416.530.234** | **200** | **1.530.020.578.256** | | |
| | | | | **PERSENTASE PELAKU UMKM YANG MENINGKAT KAPASITASNYA** | 50 | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 70 | | | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | **UPAYA MENCAPAI KEMANDIRIAN EKONOMI** | 2.17.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 4 | 4 | 254.527.034.968 | 4 | 273.370.950.211 | 4 | 298.736.749.335 | 4 | 326.634.654.925 | 4 | 1.153.269.389.439 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRI | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | AN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | 2.17.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan | 4 | 4 | 152.955.585.357 | 4 | 168.251.109.543 | 4 | 185.074.771.900 | 4 | 203.580.738.367 | 4 | 709.862.205.167 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | 2.17.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 | 317 | 152.907.496.757 | 348 | 168.198.246.433 | 382 | 185.018.071.076 | 420 | 203.519.878.184 | 1467 | 709.643.692.450 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | 2.17.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 | 111 | 48.088.600 | 111 | 52.863.110 | 111 | 56.700.824 | 111 | 60.860.183 | 444 | 218.512.717 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | 2.17.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indeks Kepuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0 | 4 | 73.820.142 | 4 | 81.202.156 | 4 | 89.322.372 | 4 | 98.254.609 | 4 | 342.599.279 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | 2.17.01.1.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 0 | 12 | 73.820.142 | 12 | 81.202.156 | 12 | 89.322.372 | 12 | 98.254.609 | 48 | 342.599.279 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | 2.17.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Kepuasaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 4 | 4 | 200.000.000 | 4 | 220.000.000 | 4 | 242.000.000 | 4 | 266.200.000 | 4 | 928.200.000 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | 2.17.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 | 13 | 200.000.000 | 13 | 220.000.000 | 13 | 242.000.000 | 13 | 266.200.000 | 52 | 928.200.000 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | 2.17.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | 4 | 4 | 17.423.617.716 | 4 | 18.821.719.308 | 4 | 20.812.235.926 | 4 | 22.505.485.428 | 4 | 79.563.058.378 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | 2.17.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 8.316.302.733 | 12 | 8.947.195.678 | 12 | 10.099.646.033 | 12 | 10.864.175.598 | 48 | 38.227.320.042 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | 2.17.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 | 1 | 2.203.729 | 1 | 2.975.034 | 1 | 4.016.296 | 1 | 5.422.000 | 4 | 14.617.059 | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | DKI JAKARTA |
| | | 2.17.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 1.310.575.448 | 12 | 1.440.111.39 | 12 | 1.559.324.163 | 12 | 1.713.858.504 | 48 | 6.023.869.508 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | 3 | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 2.17.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang | 0 | 15 | 568.091.698 | 15 | 614.636.256 | 15 | 668.943.846 | 15 | 728.509.523 | 60 | 2.580.181.323 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | Disediakan | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | 2.17.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 0 | 25 | 2.337.412.388 | 24 | 2.440.387.655 | 24 | 2.591.049.336 | 24 | 2.716.736.001 | 97 | 10.085.585.380 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | 2.17.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 | 12 | 1.310.575.448 | 12 | 1.440.111.393 | 12 | 1.559.324.163 | 12 | 1.713.858.504 | 48 | 6.023.869.508 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | 2.17.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 | 12 | 1.305.329.100 | 12 | 1.435.862.010 | 12 | 1.579.448.211 | 12 | 1.737.393.032 | 48 | 6.058.032.353 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIB | |
| | | 2.17.01 | Dukungan Pelaksanaan | Jumlah Dokumen | 0 | 1 | 2.273.127 | 1 | 2.500.439 | 1 | 2.750.483 | 1 | 3.025.532 | 4 | 10.549.58 | PUSAT DATA | DKI |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | .1.06.11 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | .172 | | .889 | | .878 | | .266 | | 3.205 | DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | JAKARTA |
| | | 2.17.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien | 0 | 4 | 4.117.026.356 | 4 | 6.150.643.984 | 4 | 6.451.698.686 | 4 | 6.815.295.025 | 4 | 23.534.664.051 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | 2.17.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 | 3 | 4.117.026.356 | 4 | 6.150.643.984 | 4 | 6.451.698.686 | 4 | 6.815.295.025 | 15 | 23.534.664.051 | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | 2.17.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 | 4 | 25.409.423.338 | 4 | 30.438.811.017 | 4 | 32.570.831.607 | 4 | 34.971.917.029 | 4 | 123.390.982.991 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | 2.17.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 | 33 | 5.527.100.204 | 22 | 6.009.496.815 | 22 | 6.524.226.836 | 22 | 7.088.860.641 | 99 | 25.149.684.496 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANG | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | AN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | 2.17.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 | 23 | 618.036.400 | 23 | 660.765.980 | 23 | 706.513.022 | 23 | 758.022.271 | 92 | 2.743.337.673 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | 2.17.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 | 58 | 19.264.286.734 | 58 | 23.768.548.222 | 58 | 25.340.091.749 | 58 | 27.125.034.117 | 232 | 95.497.960.822 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | 2.17.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 | 4 | 46.795.215.367 | 4 | 44.742.618.957 | 4 | 48.978.057.177 | 4 | 53.653.194.422 | 4 | 194.169.085.923 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | AN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 2.17.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 | 93 | 1.236.257.734 | 94 | 1.324.973.324 | 95 | 1.447.576.382 | 95 | 1.578.522.647 | 95 | 5.587.330.087 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | AN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | 2.17.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 21 | 347 | 6.262.746.556 | 332 | 6.883.962.439 | 287 | 7.567.556.194 | 337 | 8.319.818.086 | 337 | 29.034.083.275 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRI | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | AN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT DATA DAN INFORMASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | 2.17.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 | 24 | 38.874.028.005 | 24 | 36.067.940.187 | 25 | 39.463.665.435 | 25 | 43.200.761.573 | 98 | 157.606.395.200 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | 2.17.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 36 | 49 | 338.028.067 | 49 | 373.172.501 | 49 | 397.431.610 | 49 | 442.081.804 | 49 | 1.550.713.982 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | 2.17.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 | 101 | 84.155.005 | 101 | 92.570.506 | 101 | 101.827.556 | 101 | 112.010.312 | 404 | 390.563.379 | SEKRETARIAT | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA METROLOGI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN BAHAN DAN BARANG TEKNIK | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI, DAN SERTIFIKASI PRODUK PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | 2.17.01.1.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Indeks kepuasan layanan BLUD | 0 | 4 | 7.552.346.692 | 4 | 4.664.845.246 | 4 | 4.517.831.667 | 4 | 4.743.570.045 | 4 | 21.478.593.650 | UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG | DKI JAKARTA |
| | | 2.17.01.1.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 | 1 | 7.552.346.692 | 1 | 4.664.845.246 | 1 | 4.517.831.667 | 1 | 4.743.570.045 | 1 | 21.478.593.650 | UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA | DKI JAKARTA |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG | |
| | | 2.17.03 | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Persentase Koperasi Aktif yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan** | 54 | 57 | 15.600.000 | 60 | 15.600.000 | 63 | 15.600.000 | 65 | 15.600.000 | 65 | 62.400.000 | BIDANG PENGAWASAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 2.17.03.1.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi | 1,5 | 1,6 | 15.600.000 | 1,7 | 15.600.000 | 1,8 | 15.600.000 | 1,9 | 15.600.000 | 1,9 | 62.400.000 | BIDANG PENGAWASAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 2.17.03.1.01.02 | Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | 56 | 24 | 15.600.000 | 24 | 15.600.000 | 24 | 15.600.000 | 24 | 15.600.000 | 96 | 62.400.000 | BIDANG PENGAWASAN | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 2.17.05 | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya** | 40 | 50 | 811.488.122 | 60 | 1.095.508.965 | 65 | 1.095.508.965 | 70 | 1.095.508.965 | 70 | 4.098.015.017 | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANG | DKI JAKARTA |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | AN, KUKM | |
| | | 2.17.05.1.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasiyang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase koperasi aktif yang SDMnya mendapatkan pendidikandan pelatihan perkoperasian | 11,64 | 12 | 811.488.122 | 13 | 1.095.508.965 | 14 | 1.095.508.965 | 15 | 1.095.508.965 | 15 | 4.098.015.017 | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | DKI JAKARTA |
| | | 2.17.05.1.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 502 | 360 | 811.488.122 | 400 | 1.095.508.965 | 400 | 1.095.508.965 | 400 | 1.095.508.965 | 1560 | 4.098.015.017 | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | DKI JAKARTA |
| | | 2.17.06 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi** | -25 | 2 | 250.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 350.000.000 | 2 | 400.000.000 | 2 | 1.300.000.000 | BIDANG KOPERASI | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRI | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | AN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | **Persentase Koperasi konvensionalyang bertransformasi digital (modern)** | 0,46 | 0,47 | | 0,48 | | 0,49 | | 0,5 | | 0,5 | | BIDANG KOPERASI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 2.17.06.1.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yangKeanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase koperasi yangkapasitasnya meningkat | 100 | 100 | 250.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 1.300.000.000 | BIDANG KOPERASI | DKI JAKARTA |
| | | 2.17.06.1.01.02 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, | Jumlah Unit Usaha yang Produktif,Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan | 0 | 20 | 250.000.000 | 25 | 300.000.000 | 30 | 350.000.000 | 35 | 400.000.000 | 110 | 1.300.000.000 | BIDANG KOPERASI | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | | | | | | | | | | DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | 2.17.07 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri** | 2,19 | 2,5 | 76.959.128.397 | 3 | 87.209.384.921 | 3,5 | 95.639.064.718 | 4 | 105.631.089.842 | 4 | 365.438.667.878 | BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | 2.17.07.1.01 | | **Persentase SDM Usaha Mikro Kecil dan kewirausahaan yang meningkat pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro Kecil serta kapasitas dan kompetensinya** | 40 | 50 | 76.959.128.397 | 55 | 87.209.384.921 | 60 | 95.639.064.718 | 65 | 105.631.089.842 | 65 | 365.438.667.878 | BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | **Persentase peningkatan UMKM Jakpreneur yang mengikuti pembinaan kewirausahaan/naik kelas** | -21 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 8 | | BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KOTA - JAKPUS | |
| | | 2.17.07.1.01.01 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 46903 | 37150 | 75.759.128.397 | 38750 | 85.709.384.921 | 38750 | 93.764.064.718 | 38750 | 102.818.589.842 | 153400 | 358.051.167.878 | BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 2.17.07.1.01.02 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | 320 | 468 | 1.200.000.000 | 468 | 1.500.000.000 | 500 | 1.875.000.000 | 600 | 2.812.500.000 | 2036 | 7.387.500.000 | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | DKI JAKARTA |
| | | 2.17.08 | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **Persentase UMKM yang terdigitalisasi** | 43,7 | 70 | 1.226.299.160 | 80 | 1.447.249.076 | 90 | 1.538.881.184 | 100 | 1.639.676.502 | 100 | 5.852.105.922 | BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | 2.17.08.1.01 | Pengembangan Usaha Kecildengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Persentase peningkatan omsetpelaku UMKM | 27,22 | 2,78 | 1.226.299.160 | 2,9 | 1.447.249.076 | 3 | 1.538.881.184 | 3,1 | 1.639.676.502 | 3,1 | 5.852.105.922 | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANG | DKI JAKARTA |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | AN, KUKM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 2.17.08.1.01.01 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain danTeknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksidan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 0 | 25 | 833.019.160 | 50 | 916.321.076 | 75 | 1.007.953.184 | 100 | 1.108.748.502 | 100 | 3.866.041.922 | BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH | DKI JAKARTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKSEL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKBAR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA -JAKUT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRI | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN | DATA CAPAAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD | | UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | AN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN - KEP. SERIBU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKPUS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM | |
| | | 2.17.08.1.01.02 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | Jumlah Pelaku UMKM yangMemahami Literasi Hukum | 320 | 320 | 393.280.000 | 320 | 530.928.000 | 320 | 530.928.000 | 320 | 530.928.000 | 1280 | 1.986.064.000 | PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KUKM | DKI JAKARTA |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta 2022, diolah*

Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

# Bab VII

## Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta untuk empat tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD.

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1. | Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah | 12,28 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,6 |
| 2. | Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian | 11,01 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 |
| 3. | Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan | 16,85 | 16,9 | 17 | 17,1 | 17,2 | 17,2 |
| 4. | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | 5,46 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
| 5. | Persentase | 52% | 4,5% | 5% | 5,25% | 5,5% | 5,5% |

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| | Pertumbuhan Pelaku UMKM | | | | | | |
| 6. | Jumlah Koperasi yang berkualitas | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
| 7. | Persentase Pelaku UMKM yang meningkatkan Kapasitasnya | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% |

*Sumber: DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta 2022, diolah*

Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

# Bab VIII
## Penutup

# BAB VIII
# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta berlaku selama empat tahun dari tahun 2023 hingga 2026. Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi dan misi RPJPD, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Provinsi DKI Jakarta .

DKI Jakarta,  Maret 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA

**ELISABETH RATU RANTE ALLO**
NIP. 19700924 1 998032004

# RENSTRA (Rencana Strategis)
# Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
# tahun 2023 - 2026

**Pemerintah**
**DKI Jakarta**